

IMPLEMENTASI SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) DALAM SISTEM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:
DUAN YANDONO
NIM. E01111005

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak. 2015

Email: Duanyony@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah adanya ketidaknyamanan bagi peserta tes calon pegawai negeri sipil karena kurang mengerti akan teknologi, sehingga berdampak pada kegagalan saat pendaftaran, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan simulasi sistem CAT sumber daya manusia yang masih kurang dalam melaksanakan sistem pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah perlunya memberikan sosialisasi terhadap peserta calon pegawai negeri sipil mengenai teknologi informasi dan mengkaji kebijakan yang akan dilaksanakan agar pelaksanaannya berhasil di lapangan. Teori yang digunakan adalah penelitian eksploratif, Metode eksploratif digunakan karena peneliti ingin menggali atau mencari secara mendalam hal-hal yang baru dalam Implementasi Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat . Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan yang tidak terlaksana dengan baik di lapangan, kemudian sumber daya manusia dan financial menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, selain itu karakteristik organisasi badan pelaksana seperti disiplin, tanggungjawab organisasi badan pelaksana dan ketegasan organisasi badan pelaksana menjadi pendorong para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang lebih baik, selanjutnya komunikasi antar organisasi terjalin baik dengan adanya kerjasama antar organisasi pendidikan dan pemerintah, dan sikap para badan pelaksana seperti akuntabilitas, efektivitas, transparansi, dan responsive memberikan dampak positif bagi kinerja pelaksana kebijakan yang dijalankan serta lingkungan sosial yang terdiri dari peserta calon pegawai negeri sipil yang beberapa belum mengerti akan teknologi informasi.

Kata-kata Kunci :Implementasi, Sistem, *Computer Assisted Test*, Calon Pegawai Negeri Sipil.

Abstract

Problems encountered in the implementation of the system of Computer Assisted Test (CAT) in the recruitment of civil servants by the Regional Employment Board of West Kalimantan Province is the inconvenience for prospective test takers civil servants because of lack of understanding of the technology, so the impact on the failure of the registration, the lack of participation people to the information given by the Regional Employment Board and the Provincial Government of West Kalimantan in providing simulation systems CAT human resources are still lacking in implementing the utilization of information technology systems. The purpose of this research is the need to provide socialization for participants of civil service candidates on information technology and reviewing policies to be implemented so that its implementation be successful in the field. The theory used is penilitian explorative, exploratory method is used because researchers wanted to delve deeply or look for things that are new in System Implementation Computer Assisted Test (CAT) In Candidate Civil Servants By Regional Employment Board of West Kalimantan Provincial Government. The results showed that the standard and policy targets that are not performing well on the field, then the human and financial resources be a contributing factor in the implementation of the policy, in addition to the characteristics of organizations implementing agencies such as discipline, responsibility organizations implementing agencies and firmness organizations implementing agencies be driving the implementers to implement better policies, further communication between well established organization with the cooperation between educational and government organizations, and the attitude of the executing agencies such as accountability, effectiveness, transparency, and responsiveness a positive impact on the performance of implementing policies that run along social environment consisting of participants of civil service candidates that some do not understand information technology.

Keywords: Implementation, System, Computer Assisted Test, Candidate Civil Servants.

PENDAHULUAN

Dunia birokrasi tidak lepas dengan adanya pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil memberikan kontribusi dan pengaruh pada proses berjalannya suatu birokrasi atau lembaga didalam pemerintahan. Pegawai negeri sipil mencakup beberapa sektor yaitu, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan, hukum, dan ekonomi. Dari semua sektor ini, masing-masing akan dibagi lagi kedalam bagian-bagian organisasi atau dinas-dinas yang nantinya akan saling bekerja sama dalam meningkatkan jalannya suatu birokrasi. Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan menempatkan program pengembangan sumber daya manusia yaitu pegawai negeri sipil secara terencana, transparan, adil dan berkelanjutan memiliki nilai strategis. Disatu sisi kebijakan tersebut merupakan upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas yang menjamin hak asasi pegawai dalam pengembangan potensi diri, pada sisi lain baik secara kuantitas dan kualitas kinerja sumber daya manusia semakin bertambah. Berdasarkan ketentuan tersebut, perintisan pengadaan dan informasi pegawai di daerah yang ditangani Badan Kepegawaian Daerah akan sangat mendukung pengelolaan

pegawai negeri sipil di daerah. Dengan demikian dapat diciptakan sistem informasi secara cepat, tepat, dan akurat bagi seluruh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Dengan adanya pusat data dan informasi kepegawaian, maka akan memberikan masukan dan saran pada kebijakan pengembangan kapasitas pegawai. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi koordinatif dan fungsi pengelolaan kepegawaian, pemerintah provinsi mendukung kebijakan perintisan sistem informasi kepegawaian nasional. Seiring perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang cukup luas dalam berbagai bidang. Dalam pemerintahan khususnya pengembangan sistem pengelolaan pegawai negeri sipil tidak lepas dengan teknologi informasi. Dewasa ini pemanfaatan teknologi digital berhasil menemukan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru dengan istilah *Electronic Government* (e-Government). Hal ini merupakan bentuk usaha pemerintah untuk melakukan suatu interaksi dengan masyarakat yang terlampau birokratis menjadi mekanisme hubungan interaksi yang jauh lebih baik lagi. Perubahan yang dimaksudkan adalah paradigma birokrasi terdahulu yang kurang efektif menjadi lebih efektif dan efisien yang berorientasi

pada proses agar dapat memberikan dukungan yang signifikan dan kompetitif untuk masyarakat. Dengan menerapkan e-government ini pemerintah mendapatkan banyak manfaat salah satunya yaitu memperbaiki kualitas layanan pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2013 pada pasal yang kedua bahwa nilai ambang batas tes kompetensi dasar seleksi calon pegawai negeri sipil dari pelamar umum 2013, bagi instansi yang seleksinya menggunakan Computer Assisted Test (CAT) sebagai mana pada lampiran 1 Peraturan Menteri ini. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, menunjukkan bahwa pengembangan dan inovasi dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil sudah berkembang pesat dari tahun sebelumnya yang hanya menggunakan kertas dengan biaya yang cukup banyak. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan sebuah instansi pemerintahan yang tugas pokok dan fungsinya menangani tentang pegawai negeri sipil pada dinas-dinas pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Tugas dan fungsi dari

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam meningkatkan kualitas proses seleksi calon pegawai negeri sipil yang ada pada setiap instansi atau dinas pemerintah provinsi Kalimantan Barat, penerepan sistem CAT memudahkan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam proses seleksi pegawai negeri sipil. Pada tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuka formasi bagi peserta tes calon pegawai negeri sipil di instansi pemerintah provinsi dengan jumlah formasi sebanyak 159 dan pelamar yang sudah lulus seleksi administratif dengan jumlah 3.241 peserta. Partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam mengikuti tes calon pegawai negeri sipil ini. Data diatas menunjukkan bahwa dalam rentang satu hari jumlah peserta yang mendaftar sangat banyak dan melebihi hari pertama. Namun dalam pelaksanaan proses seleksi calon pegawai negeri sipil ini mengalami berbagai masalah yang dihadapi. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan ini dengan menggunakan sistem CAT terdapat kendala yang terjadi dilapangan. Masalah yang dihadapi ini adalah membuat

beberapa kalangan masyarakat kebingungan dan ada juga yang tidak tahu tentang sistem CAT ini, yang mana masyarakat yang akan mendaftar terkendala akan kurangnya pengetahuan teknologi sehingga data yang akan dimasukkan ternyata kurang lengkap, sehingga dapat dilihat dari data bahwa peserta yang lulus seleksi administratif sebanyak 3.241 orang, sedangkan jumlah yang mendaftar pada tanggal 15-16 September 2014 mencapai 3.712 orang maka yang mengalami kegagalan sebanyak yaitu 471 orang yang memiliki keinginan mengikuti tes calon pegawai negeri sipil. Kemudian hal ini menimbulkan suatu kesenjangan diantara para peserta yang mengetahui teknologi serta masyarakat yang kurang mengetahui tentang teknologi. Padahal Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah mengadakan simulasi dalam persiapan untuk memberikan pelatihan menggunakan sistem CAT. Sumber daya manusia yang terdapat pada Kantor Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih kurang dalam kesiapan mengadakan tes calon pegawai negeri sipil, dikarenakan beberapa pegawai sudah memasuki masa pensiun sehingga akan berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan.

Selain itu juga masalah yang dihadapi mengenai fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam proses seleksi pegawai negeri sipil, karena dalam pelaksanaan ini masih menggunakan fasilitas perguruan tinggi yang ada di kota Pontianak sehingga terjadinya penundaan tes pelaksanaan yang disebabkan penentuan letak peserta yang akan mengikuti tes nantinya. Dari hal ini juga, yang menjadi permasalahan adalah kelayakan yang dimiliki oleh sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dalam menunjang pelaksanaan tes yang akan diadakan, apabila tidak ada pemeriksaan yang maksimal maka proses tes yang akan dilaksanakan akan terganggu. Berdasarkan paparan masalah yang terjadi diatas, memang dalam pelaksanaan kebijakan pasti ada kendala yang dihadapi. Demikian hal nya dengan pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan sistem CAT belum berjalan secara maksimal. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam permasalahan ini dengan judul penelitian “ Implementasi Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat”. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan mengenai implementasi kebijakan

pemanfaatan teknologi informasi pada penerimaan calon pegawai negeri sipil pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014, yakni :

- 1) Adanya ketidaknyamanan bagi peserta tes calon pegawai negeri sipil karena kurang mengerti akan teknologi, sehingga berdampak pada kegagalan saat pendaftaran.
- 2) Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemrov KalBar dalam memberikan simulasi sistem CAT.
- 3) Sumber daya manusia yang masih kurang dalam melaksanakan sistem pemanfaatan teknologi informasi.

Fokus Penelitian :Proses Proses Implementasi Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Rumusan Penelitian : Faktor apa saja yang menyebabkan proses Implementasi Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum terlaksana dengan baik?. Tujuan Penelitian: untuk untuk mengungkap dan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi kendala mengenai

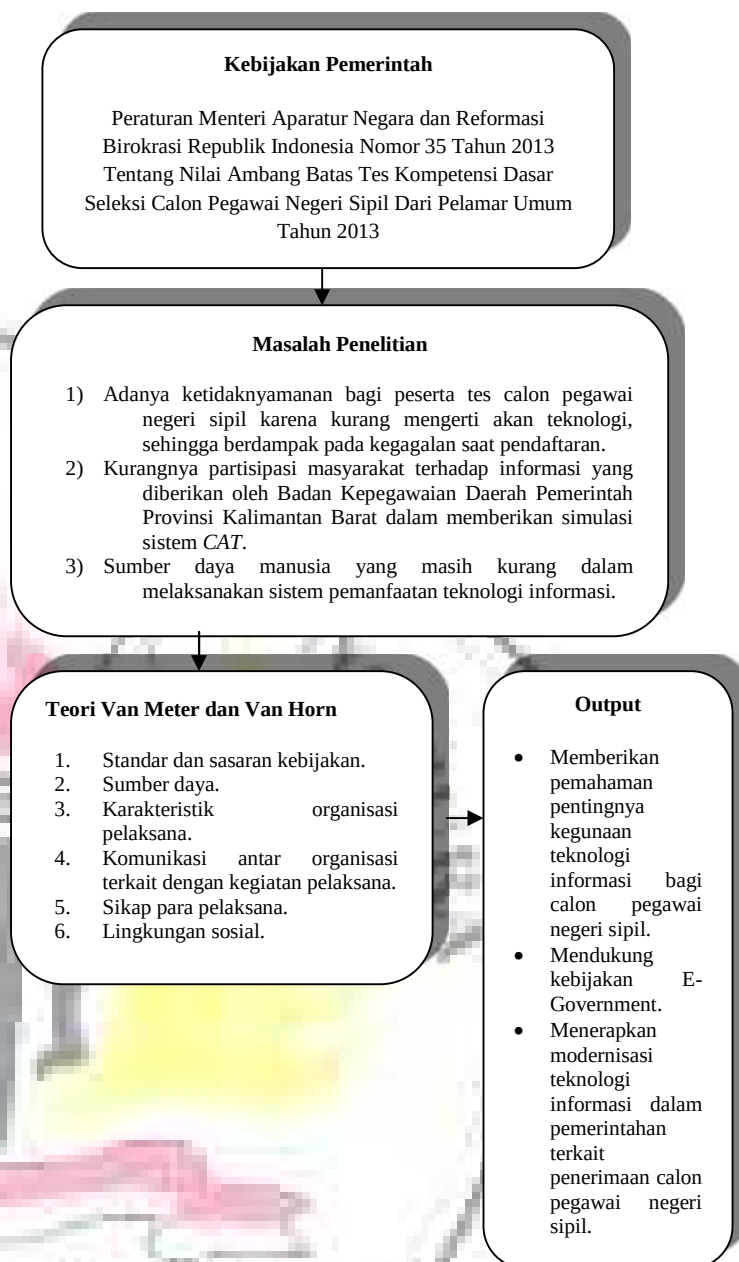
proses implementasi Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Thomas R. Dye (dalam Subarsono, 2010 : 2), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektivitasnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Selanjutnya William N. Dunn (dalam Subarsono 2005:9) mengatakan proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Menurut Harold Laswell (dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012 ; 17) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan adalah merupakan siklus yang hanyalah bagian atau salah satu tahap dari proses besar bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan. Salah satu model yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan adalah model Van Meter dan Van Horn, model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel tersebut yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksanan, komunikasi antar badan pelaksana, sikap para badan pelaksana, dan lingkungan sosial

KERANGKA PIKIR PENELITIAN



METODE PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang ada dilatar belakang penelitian bahwa Standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya, Karekteristik Organisasi Badan Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Sikap Para Badan Pelaksana, dan Lingkungan Sosial dalam Implementasi Sistem *Computer*

Assisted Test (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, masih belum terlaksana dengan baik dilapangan, oleh sebab itu peneliti menggunakan metode penelitian jenis penelitian eksploratif, yang bertujuan sebagai langkah pertama untuk penelitian yang lebih mendalam, baik penelitian deskriptif maupun eksplanatori. Melalui penelitian ini maka masalah penelitian dapat dirumuskan dengan jelas.(Sugiyono, 2009 : 2). Metode eksploratif digunakan karena peneliti ingin menggali atau mencari secara mendalam hal-hal yang baru dalam implementasi kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem penerimaan calon pegawai negeri sipil pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat . Dengan menggunakan metode ini peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami serta mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan dari permasalahan yang diteliti.

HASIL PEMBAHASAN.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan Implementasi Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian

Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Kebijakan yang dilaksanakan tentunya mengalami tantangan dan juga hambatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan *CAT* yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2013 merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan secara nasional dan setiap daerah harus melaksanakan kebijakan tersebut dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil.

Terdapat beberapa hal yang dialami oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mampu melaksanakan kebijakan ini, hal ini diakui oleh Bidang Pengadaan Dan Mutasi Pegawai Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bahwa kebijakan ini sangat sulit dan mendadak untuk dilaksanakan dikarenakan Provinsi Kalimantan Barat belum siap untuk melaksanakan tes penerimaan calon pegawai negeri sipil secara online. Selanjutnya beberapa kalangan masyarakat belum mengenal teknologi secara mendalam sehingga masyarakat yang tidak mengerti teknologi akan dirugikan dalam

hal ini, walaupun pihak Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bisa melaksanakan kebijakan tersebut namun teknis dilapangan mengalami hambatan serta adanya kesulitan yang dialami.

Kebijakan tes calon pegawai negeri sipil dengan sistem CAT ini merupakan kebijakan secara nasional dan merata disetiap daerah yang ada di Indonesia, secara otomatis setiap daerah harus melaksanakan kebijakan ini dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil. Kesiapan pihak dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan kebijakan tes calon pegawai negeri sipil dengan sistem CAT masih kurang serta masih ada masalah yang harus dihadapi. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan tes calon pegawai negeri sipil dengan sistem CAT harus melihat kondisi setiap daerah serta kesiapan daerah dalam melaksanakannya, maka perlunya meninjau kembali kesiapan daerah dalam melaksanakan kebijakan ini.

Menurut A. Rasyid, S.IP selaku Kepala Bidang Pengadaan Dan Mutasi Pegawai Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti beliau mengatakan bahwa kebijakan CAT sudah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya dilapangan mengalami kendala.

Adanya berbagai masalah tersebut diatas seharusnya pihak Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelatihan serta pengenalan teknologi online dalam tes penerimaan calon pegawai negeri sipil kepada masyarakat yang mengikuti tes secara merata. Kemudian tanggap dan sigap dalam pelaksanaan tes secara online kedepannya dalam hal teknis dilapangan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan yang dijalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil mengalami kendala teknis pelaksanaan dilapangan yang berkaitan dengan peserta tes calon pegawai negeri sipil. Oleh karena itu perlunya dalam hal ini melihat apakah kebijakan ini dapat dilaksanakan kedepannya, apabila dilanjutkan maka adanya strategi pelaksanaan teknis kebijakan yang tepat bagi para peserta tes dan memberikan edukasi dalam pengenalan sistem CAT.

2. Sumber Daya Implementasi Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jumlah sumber daya manusia yang harus disediakan oleh suatu dinas atau organisasi sangat bergantung pada tugas yang harus dilaksanakan. Semakin kompleks suatu kebijakan maka semakin banyak pula jumlah sumber daya manusia yang harus disediakan untuk menjalankan tugas yaitu mengimplementasikan kebijakan. Sementara itu jika kebijakan yang harus diimplementasikan sederhana maka semakin sedikit pula jumlah sumber daya manusia yang diperlukan. Adapun jumlah sumber daya manusia yang ada pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014, berjumlah 68 orang.

Ketersedian sumber daya manusia yang ada pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih kurang dari tingkat kuantitasnya, karena yang melaksanakan kebijakan sistem CAT adalah pada Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang jumlah pegawainya sebanyak 10 orang. Secara kuantitas pegawai yang dimiliki oleh Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai melaksanakan sistem CAT sangatlah minim, maka diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan teknis maupun non teknis daripada seleksi calon pegawai negeri sipil dengan menggunakan sistem

CAT. Selain itu, sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sumber daya financial yang dananya merupakan dari pusat dan pihak Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengelola dana tersebut untuk pelaksanaan kebijakan CAT. Peneliti juga mewawancarai Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai dan Sub Bidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian, mengatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah memadai untuk melaksanakan kebijakan namun sumber daya manusia kedepannya akan mengalami pengurangan karena beberapa pegawai akan masuk dalam masa pensiun.

Dari kesimpulan wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari dua sumber daya, yaitu sumber daya finansial, berupa anggaran dana yang diberikan dari Pemerintah Pusat serta sumber daya manusia yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan staff. Namun dalam hal sumber daya manusia sebagian besar para pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan pensiun, maka dari itu perlunya pengadaan pegawai negeri sipil untuk formasi yang dibutuhkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Povinsi Kalimantan Barat, apabila tidak ada monotorium pegawai negeri sipil.

3. Karekteristik Organisasi Badan Pelaksana Implementasi Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki karakteristik organisasi yang tertata rapi dan terorganisir. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang dimiliki dan memiliki tugas dan fungsi pokok yang telah ditentukan oleh Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Karakteristik dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

1. Disiplin

Disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma dan kaidah yang berlaku. Disiplin kerja adalah

sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan. Kedisiplinan dapat dilakukan dengan latihan antara lain dengan bekerja menghargai waktu dan biaya akan memberikan pengaruh yang positif terhadap produktivitas kerja pegawai. Dalam pelaksanaan kebijakan perlunya sikap disiplin yang harus dimiliki oleh agen pelaksana kebijakan. Kedisiplinan yang harus dimiliki oleh agen pelaksana meliputi kedisiplinan waktu, kedisiplinan menataati mekanisme dalam melaksanakan kebijakan dan kedisiplinan mentaati perintah dari atasan dalam konteks perintah kebijakan dari pemerintah pusat.

2. Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana

Tanggung jawab merupakan suatu bentuk realisasi kepatuhan terhadap suatu komitmen yang telah dibuat sebelumnya. dalam konteks pelaksanaan kebijakan penerapan teknologi informasi dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil melalui sistem CAT, tanggung jawab organisasi pelaksana dapat direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang mencakup pelaksanaan kebijakan, pengawasan kebijakan serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh intern organisasi maupun ekstern organisasi dengan batasan-batasan informasi tertentu.

3. Ketegasan Organisasi Pelaksana.

Ketegasan adalah suatu sikap dimana berani menentukan dan memutuskan status suatu persoalan. Ketegasan bukanlah kesewenang-wenangan, melainkan suatu tindakan yang didasari oleh rasionalisasi yang kongkrit dan atau berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Ketegasan juga bisa dibilang sikap independen untuk mencapai suatu tujuan atau keputusan. Sikap tegas dibutuhkan dalam berbagai interaksi, terutama yang menyangkut pengambilan atau keputusan persoalan. Karena ketegasan ini yang nantinya akan membawa kondisi dalam pelaksanaan kebijakan. Ketegasan sangat dibutuhkan dalam membangun kredibilitas dan kompetensi. Ketegasan dalam organisasi pelaksana sangat penting untuk dimiliki serta dilaksanakan supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Dari sekian susunan organisasi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang melaksanakan kebijakan pengadaan tes penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan sistem CAT adalah Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai yang memiliki dua Subbidang yaitu Subbidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian serta Subbidang

Kepangkatan. Namun setiap bagian organisasi pelaksana yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pada pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena implementasi kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara tertib, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan dapat sekeras dan tidak setegas pada hal pertama yang telah dijelaskan.

Pelaksanaan suatu program membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaannya, Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal pengadaan tes

calon pegawai negeri sipil memiliki SOP (standar operational system) yang menjadi patokan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan, namun tidak berarti para pelaksana menjadi kaku dalam pelaksanaannya.

4. Komunikasi Antar Organisasi Pada Implementasi Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pada proses pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan yang berkaitan dengan komunikasi, pihak kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan kerja sama dengan instansi-instansi seperti Badan Kepegawaian Negara, pihak keamanan seperti Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan Anggota Kepolisian Polda Kalimantan Barat serta instansi pendidikan seperti kampus yang ada di wilayah kota Pontianak. Kerja sama ini bertujuan untuk menjalin koordinasi mengenai proses pelaksanaan kebijakan penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan sistem CAT serta turut membantu pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi yang terjalin dengan pihak Badan Kepegawaian Negara Republik

Indonesia sudah cukup baik dilakukan oleh pihak kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pihak Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia mengirimkan tim pengawas dari pusat untuk memantau proses berlangsungnya pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil dengan sistem CAT, setelah semua proses tes terlaksana maka pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat langsung menuju pusat untuk membawa hasil tes calon pegawai negeri sipil kepada pihak Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dalam bentuk server. Maka hasil dari tes ini akan langsung diberikan kembali kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk diumumkan kepada peserta tes calon pegawai negeri sipil.

Pihak badan kepegawaian daerah pemerintah provinsi Kalimantan barat juga menjalin komunikasi dengan pihak keamanan seperti Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan Anggota Kepolisian Polda Kalimantan Barat. kerjasama ini bertujuan untuk mengamankan proses pelaksanaan tes yang sedang berlangsung agar tidak terjadi kekacauan dan kegaduhan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, serta mengamankan hasil ujian yang mana hasil tersebut

langsung disegel pada ruang penyegelan yang telah disediakan oleh pihak keamanan agar hasil tes calon pegawai negeri sipil tidak menimbulkan kecurangan.

Selain itu komunikasi antar organisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam proses kebijakan pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil juga terjalin dengan baik terhadap pihak instansi kampus yang ada di Pontianak. Kampus yang bekerja sama dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah kampus STMIK Pontianak yang beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 70 Pontianak. Fasilitas yang dimiliki oleh pihak kampus berupa computer dapat membantu Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan proses tes dengan sistem CAT.

Peneliti menyimpulkan, bahwa komunikasi yang dijalankan sudah tertata rapi dan jelas arah dan tujuan dari kebijakan yang diperintahkan dari atasan menuju bawahan. Dari hal ini komunikasi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah baik dan terorganisir.

5. Sikap Para Pelaksana Implementasi Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adanya sikap akuntabilitas, transparansi dan responsive memberikan dampak pada proses pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Akuntabilitas artinya memberikan pertanggungjawaban, baik menyangkut segala tindakan yang diambil, maupun yang tidak diambil dan siap menerima konsekuensinya. Maka segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam proses pelaksanaan kebijakan tes calon pegawai negeri sipil dengan sistem CAT harus mampu mempertanggungjawabkan kepada pemegang otoritas yaitu Kepala Daerah dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Transparansi dalam hal ini memberikan informasi mengenai proses penyelenggaraan rekrutmen yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan

ketaatannya pada peraturan perundang – undangan. Ditinjau dari sisi transparansi, Sistem konvensional jelas tertinggal jika dibandingkan dengan menggunakan sistem CAT. Ditinjau dari sisi efektivitas, yang perlu diperhatikan dalam jangka pendek yaitu rata rata waktu yang diperlukan untuk melakukan rekrutmen dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses perekrutan.

Responsibilitas merupakan elemen yang penting dalam memberikan dukungan antar pihak baik individu antar individu maupun dengan organisasi lainnya. Adanya kepatuhan akan kebijakan yang telah ditentukan sehingga pada akhirnya dampak yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. responsibilitas yang terjalin dari sikap pelaksana yaitu Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap beberapa organisasi diluar Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seperti Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, Anggota Kepolisian Polda Kalimantan Barat dan Kampus STMIK Pontianak sudah baik dan masing-masing memberikan hal yang positif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tes calon pegawai negeri sipil dengan sistem CAT.

6. Lingkungan Sosial Pada Implementasi Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Partisipasi masyarakat yang banyak akan keikutsertaan dalam tes calon pegawai negeri sipil dengan sistem CAT, harus menuntut peserta mengerti akan teknologi informasi. Teknologi informasi memberikan pengaruh yang sangat besar disetiap bidang, terutama dalam bidang organisasi maupun pemerintah dan juga masyarakat. Dengan adanya teknologi informasi memudahkan masyarakat untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Pelaksanaan Kebijakan tes penerimaan calon pegawai negeri sipil secara online menuntut masyarakat untuk mengetahui teknologi informasi dan juga menuntut untuk bisa menggunakannya.

Melihat kondisi ini, pada kenyataannya beberapa masyarakat belum memiliki kesadaran untuk mendalami akan pentingnya teknologi informasi, dibuktikan adanya kegagalan yang dialami oleh masyarakat pada saat mendaftar secara online dan juga tidak mengerti menggunakan teknologi CAT pada saat tes berlangsung. Perlunya masyarakat untuk belajar mengenai pentingnya teknologi informasi yang memberikan kemudahan

serta membantu dalam pelaksanaan tes secara online.

Dengan kondisi ini perlunya pihak Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mencari solusi yang tepat agar masyarakat sadar akan teknologi informasi dalam hal penerimaan calon pegawai negeri supaya dalam pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan sosial sudah memberikan dampak yang besar terhadap pelaksanaan kebijakan tes penerimaan calon pegawai negeri sipil melalui sistem online, yang dipengaruhi oleh dampak partisipasi masyarakat yang tinggi mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil. Kendala yang dihadapi adalah beberapa peserta kebingungan dengan sistem online pada saat pendaftaran dan berusaha mengirimkan data secara online dikarenakan sistem online sering mengalami gangguan. Perlunya memberikan informasi yang tepat sasaran kepada peserta dan juga himbauan penting untuk mencari informasi mengenai tata cara penggunaan sistem online pendaftaran peserta tes calon pegawai negeri sipil agar tidak terjadi kebingungan yang dialami

oleh peserta kedepannya dalam mengikuti tes calon pegawai negeri sipil.

KESIMPULAN

Sebagai akhir dari tulisan ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil temuan dilapangan yang telah dianalisa secara multidipliner untuk memproyeksikan penelitian *Impelentasi Sistem Computer Assisted Test (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat* dengan kajian teori dari Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial. Enam variabel tersebut digunakan penulis dalam menganalisis, sehingga penelitian yang berjudul *Impelentasi Sistem Computer Assisted Test (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat* disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan yang digunakan oleh pihan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Menteri

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2013. Namun dalam pelaksanaan teknis di lapangan mengalami kendala pada pendaftaran calon peserta yang belum mengetahui teknologi informasi.

- 2) Sumber Daya yang dimiliki oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sumber daya financial yang anggarannya merupakan anggaran yang telah ditentukan dari pemerintah pusat, kemudian sumber daya manusia yang dimiliki seperti pegawai dan staff, namun sumber daya manusia seperti pegawai yang ada pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah memasuki masa pensiun dan hal ini akan berpengaruh pada kinerja pelaksanaan kebijakan yang akan dijalankan.
- 3) Karakteristik Badan Pelaksana, pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat memiliki organisasi yang tertata rapi dan telah ditentukan pada Peraturan Gubernur No 70 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan SOP yang ada dan telah ditentukan.

- 4) Komunikasi antar organisasi, yang digunakan adalah komunikasi vertikal yang mana komunikasi berlangsung dari atasan menuju bawahan. Dalam hal ini kebijakan yang telah ditentukan dari Pemerintah Pusat diberikan kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dilaksanakan dan begitu juga dalam organisasi yang dijalankan menggunakan komunikasi dari atasan menuju bawahan. Komunikasi yang dijalankan cukup baik dan saling berkoordinasi satu sama lain.
- 5) Sikap para pelaksana, dalam pelaksanaan kebijakan tes penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan menggunakan sistem online sudah terjalin dengan baik, adanya keterbukaan dan saling

mendudukun pada setiap bidang yang ada pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan kebijakan.

- 6) Lingkungan sosial, berdampak pada proses pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh pihan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan partisipasi masyarakat yang sangat besar sehingga mendukung pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran agar pelaksanaan penerimaan calon pegawai negeri sipil melauai sistem online pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi lebih baik, yaitu :

- 1) Perlunya perencanaan yang matang terhadap pelaksanaan kebijakan penerimaan calon pegawai negeri sipil melalui sistem online, dan juga pihak Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai badan pelaksana kebijakan memberikan pelatihan dan edukasi dalam penggunaan tes secara online kepada para peserta yang mengikuti ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil.
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat yang akan mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk belajar mengenai teknologi informasi agar mengetahui tentang tata cara mendaftar secara online maupun tes secara online kedepannya.
- 3) Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses pelaksanaan kebijakan penerimaan calon pegawai negeri sipil secara online yang cukup tinggi memberikan tuntutan kinerja yang lebih baik pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kaliantan Barat karena sebagian dari pegawai yang ada akan memasuki masa pensiun, maka dari itu perlunya sumber daya yang mencukupi dan memadai dari sector sumber daya manusia, guna memperlancar kinerja dalam melaksanakan proses kebijakan kedepannya serta perlunya membuka formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil dibidang Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Terus mengkaji apakah kebijakan ini bisa diterapkan atau tidak kedepannya dalam hal penerimaan calon pegawai negeri sipil.

REFERENSI

Agustinus, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : IKAPI

Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Impementasi, Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

-----, 2009. Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA

-----, 2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : ALFABETA

Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : DUAN YARIDONO
NIM / Periode lulus : 60111005 / IV
Tanggal Lulus : 05-05-2015
Fakultas/ Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/ HP : duanyono@yahoo.co.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika *) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGARA SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

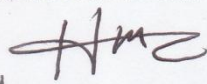
- ☐ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

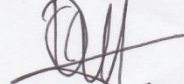
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal


Dr. Arifin, M. AB
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal : 5 JUNI 2015


DUAN YARIDONO
NIM. 60111005

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)